



Mendag Siap Kawal Pembangunan Pasar Badung

Apresiasi Program Rai Mantra Merevitalisasi Pasar Tradisional

PROYEK pembangunan fisik Pasar Badung di Kota Denpasar mendapatkan kunjungan dari Menteri Perdagangan (Mendag) RI Enggartiasto Lukita, Jumat (6/10) kemarin. Kunjungan Mendag disambut langsung Wali Kota I.B. Rai Dharmawijaya Mantra didampingi Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara, Ketua DPRD Denpasar I Gusti Ngurah Gede dan Pimpinan OPD Pemkot Denpasar. Kehadiran Mendag Enggartiasto Lukita juga meninjau program revitalisasi Pasar Nyanggelan Panjer yang dibangun pada tahun 2013 lewat dana Tugas Pembantuan (TP) APBN Kementerian Perdagangan dan APBD Pemkot Denpasar.

Mandatangi Pasar Badung, Mendag RI Enggartiasto Lukita meninjau langsung progres pembangunan fisik pasar terbesar di Bali yang saat ini telah mencapai 19 persen. Mendag Enggartiasto Lukita siap mengawal pembangunan fisik Pasar Badung, serta memberikan apresiasi program revitalisasi pasar tradisional yang dilakukan Wali Kota Rai Mantra. "Dari pembahasan dengan Bapak Wali Kota Rai Mantra,

akan saya ikuti terus perkembangan revitalisasi pasar tradisional di Kota Denpasar. Masyarakat bersyukur mempunyai Wali Kota seperti Rai Mantra yang peduli dengan rakyatnya, karena tidak banyak karakter pemimpin peduli dengan ekonomi kerakyatan," ujar Enggartiasto Lukita.

Lebih lanjut, Mendag Enggartiasto Lukita mengatakan, Denpasar merupakan denyut nadi pusat perekonomian dengan pembangunan Pasar Badung sebagai pasar rakyat menjadi perhatian khusus Presiden RI Joko Widodo. Mengingat kehadiran ritel modern di Indonesia lebih dari 32 ribu *outlet*, membuat persaingan yang tidak sehat dengan warung dan pasar tradisional. Hal ini menjadikan perhatian khusus kepada pasar tradisional baik fisik maupun nonfisik, seperti yang telah dilakukan Wali Kota Rai Mantra yang merevitalisasi pasar tradisional. "Pasar tradisional di Kota Denpasar kita jadikan percontohan di tingkat nasional, dengan program dan perhatian Wali Kota Rai Mantra yang tak terlepas dari pasar rakyat sebagai ekonomi kerakyatan,"

ujarnya sembari mengatakan akan mengawal program revitalisasi pasar di Denpasar yang memberikan manfaat kepada masyarakat.

Sementara itu, Wali Kota Rai Mantra mengatakan pembangunan Pasar Nyanggelan Panjer mendapat dana TP APBN Kementerian Perdagangan sebesar Rp 5 miliar yang saat ini terus mengalami kenaikan omzet mencapai Rp 6 miliar lebih. Sementara itu, Pasar Badung mengalami kebakaran pada 27 Februari 2016 lalu dengan kerugian mencapai Rp 66 miliar. Pasar rakyat yang beroperasi selama 24 jam ini merupakan jantung ekonomi masyarakat dengan jumlah pedagang sebanyak 1.698 pedagang terdiri dari 311 kios pedagang, 1.387 los pedagang. Capaian omzet Pasar Badung pagi sebelum terbakar mencapai Rp 7 miliar lebih per harinya, sedangkan Pasar Badung malam mencapai Rp 1 miliar lebih per hari.

Saat ini pembangunan Pasar Badung tahap I dimulai pada 26 Juli sampai dengan 22 Desember, dengan bantuan TP APBN Kementerian Perdagangan sebesar Rp 75 miliar dan

Edisi : Sabtu, 7 Okt 2017

Hal : 2



PROYEK - Menteri Perdagangan (Mendag) RI Enggartiasto Lukita didampingi Wali Kota Denpasar Rai Mantra saat mengunjungi proyek pembangunan fisik Pasar Badung, Jumat (6/10) kemarin.

dana pendampingan dari APBD Denpasar sebesar Rp 15 miliar lebih. Untuk pembangunan tahap kedua akan dilanjutkan tahun 2018 melalui APBD Denpasar dengan proses lelang pada Nopember 2017. "Kali ini yang menjadi kendala terkait dengan proses hibah memakan

waktu cukup lama, maka proses pembangunan selanjutnya akan terhambat. Apabila Bapak Menteri berkenan untuk melanjutkan pembangunan tahap II melalui dana TP tahun 2018, sehingga pembangunan dapat langsung dilaksanakan," ujar Rai Mantra. (ad436)

Edisi : Selasa 7 Okt 2017

Hal : 2



Defisit, Pembayaran Proyek Dibon

Tabanan (Bali Post) -

Akibat defisit anggaran, sejumlah proyek yang sedang dikerjakan rekanan Pemkab Tabanan tidak sepenuhnya bisa dibayar, alias ngebon sampai akhir tahun ini. Pemerintah pun berencana melakukan *re-schedule* atau penjadwalan ulang pembayaran nilai kontrak sebesar 30 persen dari total proyek itu. Kekurangan itu akan dibayar Januari 2018. Hal itu menjadi skala prioritas anggaran induk APBD 2018.

Kepala Bapelitbang Tabanan IB Wiratmaja mengakui dengan kondisi keuangan saat ini ada defisit anggaran sekitar Rp 15 miliar. Akibatnya, pembayaran beberapa proyek yang sedang dikerjakan tidak bisa sepenuhnya dibayar hingga tahun anggaran 2017. Dari perhitungan yang bisa dibayar hanya 70 persen dari total kontrak. Sisanya 30 persen akan dibayar di tahun 2018. Terkait persoalan itu, Pemkab mencari solusi dengan cara menjadwalkan ulang pembayaran 30 persen nilai proyek. Pihaknya mengakumulasikan nilai uang yang belum bisa dibayarkan sekitar Rp 5,7 miliar. "Tetapi kan masih rencana. Siapa tahu tiga bulan ke depan ada peningkatan pendapatan daerah atau sisa lebih penggunaan anggaran (silpa). Jika ada uangnya kami akan langsung bayar," terangnya.

Proyek-proyek yang dibon tersebut ada di Dinas Kesehatan dan PU. Seperti pengerasan jalan menuju TPP Sanda dengan nilai total proyek Rp 2,9 miliar, perbaikan jalan ke Pura Malen nilai total Rp 2,1 miliar, rehab gedung DPRD Tabanan nilai total proyek Rp 820 juta, rehab gedung Badan Keuangan Daerah nilai total proyek Rp 916 juta, pembangunan tahap tiga Museum Sagung Wah nilai total proyek Rp 2,5 miliar, rehab Gedung Kesenian I Ketut Maria nilai total proyek Rp 7,7 miliar, lanjutan penyelesaian panggung terbuka nilai total proyeknya Rp 3,4 miliar, pembangunan Puskesmas Pembantu Luwus nilai total proyek Rp 520 juta, pembangunan Puskesmas Pembantu Kesiut nilai total proyek Rp 475 juta dan pembangunan Puskesmas Pembantu Mekayu nilai total proyek Rp 419 juta.

"Meski ada penjadwalan ulang pembayaran, namun proyek ini harus tuntas sebelum akhir tahun 2017," ucapnya. (kmb28)



Bali Post/kmb28
GEDUNG KEUANGAN - Proyek perbaikan gedung Badan Keuangan Daerah.

Edisi : Selasa, 10 Oktober 2017

Hal : 14



Tersangka Korupsi Kapal Ikan Sudah Pelimpahan Tahap II

PEMBERKASAN dugaan korupsi pengadaan kapal ikan untuk sejumlah nelayan di Buleleng sudah dilakukan pelimpahan tahap II. Yakni, pelimpahan barang bukti dan tersangka ke jaksa penuntut umum (JPU). Hal tersebut dibenarkan Kajati Bali Dr. Jaya Kesuma, Senin (9/10) kemarin.

Namun demikian, dari sebelas tersangka yang sudah ditetapkan, hanya dua tersangka yang sudah dilakukan tahap II. Kajati Jaya Kesuma menjelaskan, dalam perkara ini sudah ada sebelas kapal yang disita. "Empat kapal merupakan pengadaan dari Kelautan Provinsi Bali dan tujuh kapal dari Kementerian," jelasnya.

Yang menjadi persoalan, ada dugaan bahwa speks kapal itu berbeda dan tidak standar kapal pada umumnya. Sehingga bantuan kapal itu juga tidak bisa diterima masyarakat nelayan, karena takut jika dipaksakan akan membahayakan. Menurut Jaya Kesuma, di sinilah letak kerugian negaranya yakni bantuan kapal yang dananya bersumber dari negara tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. "Sama misalnya saya memberikan sepeda motor ke Aspidsus. Jika saya memberikan bantuan motor dan tidak bisa dipakai, ya bisa jadi ini bentuk korupsi karena menggunakan uang negara," kata Jaya Kesuma mencontohkan.

Dua tersangka pengadaan kapal yang sudah ditahan itu adalah FB dan S. Informasi yang didapat *Bali Post*, FB adalah Fuad Bachtiar Baúa Giel dan S adalah Suyadi yang merupakan rekanan yang mengerjakan kapal. (asa)

Edisi : Selasa, 10 Okt 2017

Hal : 3